

Tawanan Ketidakadilan: Bagaimana Sistem Penahanan Israel dan Strategi Penyanderaan Hamas Mempertahankan Siklus Penderitaan

Konflik yang terus berlangsung antara warga Israel dan Palestina secara tragis tercermin dalam siklus tawanan: sistem penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan dehumanisasi terhadap warga Palestina oleh Israel, serta penyanderaan oleh Hamas sebagai tanggapan. Kedua praktik ini menyebabkan penderitaan yang tak terukur. Warga Palestina hidup di bawah ancaman konstan untuk hilang ke dalam sistem yang tidak memiliki proses hukum yang adil, sementara warga Israel berduka atas orang-orang yang mereka cintai yang ditahan oleh kelompok bersenjata. Hasilnya adalah lingkaran umpan balik abadi dari trauma, kemarahan, dan radikalisasi.

Siklus ini bisa saja diputus—paling baru melalui kesepakatan yang dinegosiasikan pada Oktober 2023 yang mungkin telah membebaskan tawanan dari kedua belah pihak. Namun, pemerintah Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, didorong oleh elemen ekstremis, memilih eskalasi daripada diplomasi, menyingkirkan negosiator kunci dan memperpanjang penderitaan. Penolakan untuk mengakhiri rezim penahanan ilegal Israel dan penolakan terhadap saluran diplomatik telah memperkuat spiral penderitaan.

Rezim Penahanan Israel: Ketidakadilan yang Terlembaga

Sejak tahun 1967, Israel telah menggunakan penahanan administratif dan pengadilan militer di Wilayah Pendudukan Palestina sebagai alat kontrol. Mekanisme ini beroperasi sepenuhnya di luar batas norma hukum internasional. Warga Palestina dapat dipenjara tanpa batas waktu tanpa dakwaan atau pengadilan, berdasarkan bukti rahasia, tanpa sarana banding yang efektif. Pengadilan militer, dengan tingkat vonis hampir 99,7%, berfungsi sebagai alat pemaksaan, bukan keadilan. Praktik ini secara langsung melanggar **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 9 dan 10)**, **Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 9 dan 14)**, dan **Konvensi Jenewa Keempat (Pasal 64–66)**.

Penyiksaan dan penyalahgunaan bersifat sistematis. Banyak laporan dari badan-badan PBB dan organisasi hak asasi manusia mendokumentasikan penggunaan pemukulan, posisi stres, penyiksaan air, kejutan listrik, penghinaan seksual, dan pemerkosaan dengan benda. Sebuah laporan tahun 2015 mencatat setidaknya 60 kasus penyiksaan seksual antara tahun 2005 dan 2012. Tindakan ini melanggar **Konvensi Menentang Penyiksaan (Pasal 1 dan 16)** dan **Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik**, yang melarang penyiksaan dalam segala keadaan.

Sejak 7 Oktober 2023, penyalahgunaan ini meningkat secara dramatis. Hingga Agustus 2024, setidaknya 53 tahanan Palestina telah meninggal dalam tahanan, banyak di antaranya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Anak-anak berusia 14 tahun telah dipaksa telanjang dan mengalami perlakuan yang merendahkan. Secara efektif, warga Palestina yang ditahan dalam kondisi seperti itu tidak hanya dirampas kebebasannya tetapi juga kemanusiaannya. Mengingat sifat sistematis dan niat untuk menekan populasi sipil, tindakan ini dapat dikatakan memenuhi definisi penyanderaan menurut **Konvensi Internasional Menentang Pengambilan Sandera 1979**, yang mencakup penahanan individu di bawah ancaman cedera atau kematian untuk memaksa pihak ketiga—dalam hal ini, masyarakat Palestina—untuk bertindak.

Kehancuran Psikologis dalam Masyarakat Palestina

Trauma yang disebabkan oleh penahanan sewenang-wenang meluas jauh melampaui dinding penjara. Keluarga hidup dalam ketakutan konstan bahwa orang yang mereka cintai—terutama anak-anak—akan diambil pada malam hari, ditahan tanpa komunikasi, dan disiksa. Bagi banyak warga Palestina, kata “penahanan” tidak berarti proses hukum yang adil—itu berarti hilang, kekerasan, dan kemungkinan kematian. Hingga tahun 2024, lebih dari 9.500 warga Palestina telah ditahan, memicu teror dan kesedihan kolektif.

Penderitaan yang meluas ini tidak menghasilkan kepasifan, melainkan perlawanan. Keluarga dan komunitas, yang putus asa mencari jawaban, sering kali beralih ke entitas yang menjanjikan pengaruh—kelompok bersenjata. Ini bukan pembenaran untuk kekerasan, melainkan pengakuan atas realitas psikologis: ketika anak Anda ditahan secara tidak sah, disiksa, dan ada kemungkinan besar Anda tidak akan pernah melihatnya hidup lagi, naluri untuk melakukan *apa saja* untuk memastikan kembalinya adalah sangat manusiawi. Dorongan psikologis ini, meskipun bukan pembelaan menurut hukum internasional, adalah kunci untuk memahami strategi Hamas.

Penyanderaan oleh Hamas: Tidak Sah tetapi Dapat Dipahami

Pada 7 Oktober 2023, Hamas menangkap 251 sandera Israel, mengejutkan dunia. Tindakan ini ilegal dan secara moral tidak dapat dibenarkan menurut **Konvensi Sandera 1979**, yang secara tegas melarang penyanderaan warga sipil untuk memaksa tindakan pemerintah. Namun, Hamas tidak menciptakan taktik ini dari kekosongan—ini memiliki preseden historis dan logika psikologis.

Pertukaran tahanan Gilad Shalit pada tahun 2011, di mana lebih dari 1.000 warga Palestina dibebaskan sebagai ganti satu tentara Israel, memperkuat pandangan di kalangan warga Palestina bahwa hanya penyanderaan yang menghasilkan hasil. Karena sistem hukum Israel tidak menawarkan jalan menuju keadilan bagi tahanan, Hamas memanfaatkan sandera sebagai alat tawar-menawar—strategi yang secara etis menjijikkan namun efektif secara politik. Sekali lagi, intinya bukan untuk membela tindakan tersebut, melainkan untuk menghadapi akarnya: masyarakat yang telah dibrutalisasi hingga percaya bahwa diplomasi dan legalitas tidak memiliki nilai.

Kesetaraan moral dan hukum, oleh karena itu, tidak terletak pada metode—penyanderaan dan penahanan—tetapi pada ilegalitas mendasar dan efek dehumanisasinya. Penahanan sewenang-wenang oleh Israel dan penyanderaan oleh Hamas keduanya merupakan pelanggaran hukum internasional dan keduanya menargetkan warga sipil. Yang satu didukung oleh negara, rutin, dan diselimuti dalam birokrasi hukum; yang lain spektakuler dan segera. Namun keduanya adalah bagian dari siklus pemaksaan, trauma, dan keputusan yang sama.

Penderitaan Bersama

Kesedihan di pihak Israel sangat dalam. Keluarga sandera menanggung ketidakpastian yang menyiksa, tidak mampu mengetahui apakah orang yang mereka cintai masih hidup, apalagi kapan atau bagaimana mereka akan kembali. Penderitaan mereka mencerminkan penderitaan keluarga Palestina yang mengalami ketidakhadiran, ketakutan, dan ketidakberdayaan yang sama di bawah nama yang berbeda: “penahanan administratif.”

Penderitaan paralel ini seharusnya menciptakan ruang untuk empati. Sebaliknya, itu telah dijadikan senjata. Para pengunjung rasa di Israel yang menyerukan gencatan senjata dan kesepakatan sandera telah diabaikan atau ditolak. Keluarga sandera Israel, termasuk tokoh seperti Haim Rubinstein, telah secara terbuka menuduh pemerintah Netanyahu mengorbankan orang yang mereka cintai demi keuntungan politik.

Kesempatan yang Terlewat dan Kegagalan Kebijakan

Jalan keluar dari jurang ini ada. Pada Oktober 2023, negosiasi di belakang layar yang dipimpin oleh Gershon Baskin, dengan mediasi dari Qatar dan kontak Hamas, menawarkan kerangka yang layak untuk pembebasan bersama. Namun pemerintah garis keras Netanyahu, yang didominasi oleh ultranasionalis seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, menolak proposal ini. Oren Setter, yang saat itu merupakan pejabat kunci dalam negosiasi sandera, mengundurkan diri sebagai protes atas kesempatan yang terlewat.

Ini bukan kesalahan taktis—ini adalah kegagalan moral. Memprioritaskan eskalasi militer daripada resolusi kemanusiaan tidak membebaskan warga Israel maupun Palestina. Ini telah memperdalam penderitaan, mendorong radikalisasi lebih lanjut, dan memperkuat penggunaan tawanan sebagai alat perang.

Memutus Siklus

Mengakhiri siklus ini tidak dimulai dengan serangan udara atau penyelamatan sandera, tetapi dengan membongkar struktur yang membuatnya diperlukan. Israel harus menghapus sistem penahanan sewenang-wenang dan pengadilan militernya—praktik yang menghancurkan supremasi hukum dan memicu pembalasan kekerasan. Tanpa mengatasi ketidakadilan inti ini, gencatan senjata sementara atau pertukaran apa pun hanya akan menunda siklus berikutnya dari penculikan dan pertumpahan darah.

Keadilan tidak boleh selektif. Prinsip yang sama yang mengutuk penyanderaan oleh Hamas juga harus menolak penahanan tanpa batas dan di luar hukum terhadap warga sipil oleh Israel. Hingga kedua bentuk penahanan ini dihapuskan, kedua rakyat akan tetap menjadi tawanan sistem yang berkembang dari penderitaan bersama.